

02. PERILAKU DISFUNGSIONAL PADA SIKLUS PENGANGGARAN PEMERINTAH: TAHAP PERENCANAAN ANGGARAN

By Indrawati Yuhertiana

PERILAKU DISFUNGSIONAL PADA SIKLUS PENGANGGARAN PEMERINTAH: TAHAP PERENCANAAN ANGGARAN

Indrawati Yuhertiana

e-mail: yuhertiana@upnjatim.ac.id
Universitas Pembangunan Jawa Timur

Soeparlan Pranoto

e-mail: pranoto@upnjatim.ac.id
Universitas Pembangunan Jawa Timur

Heru Priono

e-mail: herupriono@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is mapping out the dysfunctional behavior that occurs in government budgeting cycle particularly at the stage of budget planning. The study was conducted on 18 proceedings of the Indonesia National Accounting Symposium (SNA), exploring 1,569 articles and focused in 30 selected public sector accounting articles. Content analysis used to identify psychological, sociological and political aspects related dysfunctional behaviors at the planning stage and ratification. It is found that all of aspects explored coincide in the budget planning stage. Pseudo participation found as a formality involvement in budgeting process. It causes the tendency of moral hazard.

Keywords: dysfunctional behaviour, government budget, content analysis

<http://dx.doi.org/10.20885/joai.vol19.no1.art1>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan perilaku disfungsiional yang terjadi pada siklus penganggaran pemerintah, khususnya pada tahap perencanaan anggaran. Penelitian dilakukan pada artikel yang dipublikasikan pada 18 prosiding Simposium Nasional Akuntansi (SNA). Penelitian dilakukan dengan studi literatur pada 1.569 artikel dengan 30 artikel terpilih. Dilakukan analisis konten untuk memetakan dan mengidentifikasi aspek psikologis, sosiologis dan politik terkait perilaku disfungsiional pada tahap perencanaan dan ratifikasi. Aspek psikologi, sosiologi, politik dan perilaku disfungsiional berimpitan dalam tahap perencanaan anggaran. Partisipasi anggaran yang melibatkan masyarakat banyak ditemukan sebagai formalitas semu menyebabkan adanya kecenderungan moral hazard.

Kata kunci: perilaku disfungsiional, pemerintah, analisis konten

PENDAHULUAN

Perencanaan anggaran adalah tahap awal dan paling penting dalam siklus anggaran pemerintah yang terdiri dari tahap perencanaan, ratifikasi, implementasi dan pengawasan. Perencanaan bahkan sudah menjadi kajian menarik di ranah administrasi publik (Dwiputrianti 2012; Helmuth 2011; Sriwigati dan Fitrianto 2012) maupun di ranah akuntansi sektor publik (Amiati dan Kartikaningdyah

2010; Yuhertiana 2005). Perencanaan anggaran pemerintah memerlukan waktu yang cukup lama, melibatkan banyak pihak atau stakeholder. Penelitian pada tahap ini biasanya menginvestigasi proses penganggaran, partisipatif atau sentralistik.

Belakangan karena perubahan sistem penganggaran era *new public management* (Rissessor 2010) arah penelitian menuju evaluasi atas jenis penganggaran kinerja (McGill 2001). Hal ini untuk memastikan bahwa

proses penganggaran tidak lagi dilakukan secara inkremental saja tetapi juga sudah memprediksi *outcome* atas input yang direncanakan.

Anggaran juga tidak lepas dari akuntabilitas (Goddard 2004; Rashid dan Goddard 2015). Pada tataran praktik terdapat fenomena yang memprihatinkan karena pada empat siklus penganggaran pemerintah bermunculan perilaku disfungsional misalnya berbagai kasus penyelewengan anggaran (Fakhry dan Said 2014; Sudang dan Utomo 2012) dan keuangan negara. Oportunitis dalam proses formulasi anggaran sering juga dijumpai (Abdullah 2012; Abdullah dan Asmara 2006; Sujatn dan Wibawa 2013). Perilaku disfungsional bahkan muncul pada tiap tahap dari empat tahap penganggaran pemerintah. Sejalan dengan itu, Abdullah (2012) memandang bahwa pada setiap tahapan penyusunan anggaran terdapat ruang terjadinya praktik korupsi. Tahap perencanaan terdapat penyimpangan etika karena adanya kecenderungan *mark-up* anggaran/*budgetary slack* agar kinerjanya dianggap baik Yuhertiana (2005). Tahap ratifikasi muncul adanya kolusi antara eksekutif dan legislatif atas program program tertentu untuk kepentingan tertentu, bahkan mafia anggaran akan muncul pada proses ini (Amri dan Priatmojo 2012).

Tahap implementasi anggaran adalah tahap anggaran dilaksanakan. Perilaku disfungsional terjadi juga saat reses (Hendriyanto dan Setiyono 2014). Penyelewengan anggaran pada tahap ini terjadi dengan adanya kolusi antara eksekutif dan pihak swasta khususnya kasus-kasus yang terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa (Aprilia 2013; Kenarwas 2013; Rosadi 2013; Situngkir dan Mulyana 2013). Tahap pemeriksaan, muncul perilaku disfungsional yang melibatkan pemeriksa internal (Puspasari dan Dewi 2015) dan pemeriksa eksternal (Sudjana dan Sawarjowono 2006).

Sangat penting untuk memahami penyebab kerugian negara ini dari aspek disfungsional behavior supaya dapat diperoleh penjelasan humanisme untuk menekan kerugian negara. Memahami faktor psikis, alasan

pribadi, and budaya turut mempengaruhi keputusan seseorang dalam keterlibatannya dalam proses penganggaran. Oleh karena itu penelitian ini memiliki target khusus untuk mengembangkan model antisipasi perilaku disfungsional dalam siklus penganggaran pemerintah dalam konteks ilmu akuntansi keperilakuan di sektor publik. Dengan demikian diharapkan bermanfaat untuk mengeksplorasi benih-benih timbulnya perilaku disfungsional yang terjadi pada tahap perencanaan karena adanya indikasi bahwa penyelewengan anggaran (korupsi) bahkan dimulai pada saat perencanaan. Selama ini penelitian untuk menggali perilaku disfungsional khusus pada tahap perencanaan, sebagai tahap persiapan anggaran, khususnya di sektor pemerintahan belum banyak dilakukan.

Penelitian ini mengeksplorasi 18 prosiding Simposium Nasional Akuntansi (SNA) mulai tahun 1997 sampai dengan 2015.

4.1.1. Kegiatan tahunan yang diselenggarakan Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI-KAPD) adalah ajang *simposium pretese*, dengan seleksi ketat, dilakukan *blind review* atas seluruh hasil penelitian Perguruan Tinggi di Indonesia. Ketatnya proses review SNA menghasilkan penelitian yang berkualitas sehingga menjadikan SNA sebagai barometer kemajuan penelitian akuntansi di Indonesia. Total artikel adalah 1.587 buah, setelah melalui tiga kali saringan, maka dilakukan eksplorasi mendetil pada 30 artikel terpilih.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Banyaknya permasalahan terkait *white collar criminal* (kejahatan kerah putih) diduga terkait dengan angka, uang, transaksi. Disinilah kemudian ada akuntansi dan perilaku (Balsmeier dan Kelly 1996). Dengan demikian perkembangan akuntansi saat ini tidak lagi berfokus hanya sebagai bahasa bisnis yang hanya berbicara tentang angka melainkan terkait juga dengan faktor kepribadian seseorang, kondisi psikologis, faktor budaya, sampai dengan faktor sosiologi-kemasyarakatan.

Namun demikian sampai saat ini akuntansi keperilakuan masih sering diperdebatkan, benarkah merupakan bagian dalam ilmu akuntansi? Hal ini dapat dimaklumi karena akuntansi masih sering dianggap sebagai ilmu ekonomi yang berada pada ranah sosial positif, bukan ilmu sosial normatif seperti psikologi atau sosiologi. Sehingga masih banyak yang memperdebatkan keberadaan akuntansi keperilakuan sebagai ilmu. Siegel dan Marconi (1989) menyatakan bahwa akuntansi keperilakuan merupakan cabang ilmu akuntansi ketiga setelah akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Di sisi lain, terdapat anggapan bahwa akuntansi keperilakuan sebagai ilmu namun akuntansi keperilakuan adalah suatu pendekatan yang mengaplikasi aspek keperilakuan dalam akuntansi baik akuntansi keuangan, akuntansi manajemen maupun bidang akuntansi lainnya.

Terlepas dari perdebatan tersebut, minat melakukan penelitian bidang ini masih meningkat dari hari ke hari. Hal ini membuktikan bahwa permasalahan di realitas menunjukkan dominannya aspek keperilakuan dalam implementasi akuntansi. Hal ini dapat dipahami karena kemajuan perekonomian meningkatkan permintaan berbagai fungsi akuntansi di dalamnya. Siegel dan Marconi (1989) juga mengatakan bahwa *behavioral accounting goes beyond the traditional accounting role of collecting, recording, reporting financial information*.

Dimensi akuntansi keperilakuan terkait dengan aspek perilaku manusia dan hubungannya dengan desain, konstruksi dan penggunaan sistem informasi akuntansi yang efisien. Oleh karena akuntansi keperilakuan merefleksikan dimensi sosial akibat penerapan teknik, sistem akuntansi dimana pada hakikatnya informasi akuntansi dibutuhkan manajemen untuk melakukan pengendalian baik pengendalian manajemen, administratif maupun pengendalian akuntansi. Dengan demikian jelas bahwa cakupan akuntansi keperilakuan meliputi: 1. *The effect of human behavior on the design, construction and use of the acc. system*, 2. *The effect of the acc. system on human behavior*, 3. *Methods to predict and*

strategies to change human behavior. Dengan demikian, di dalam akuntansi keperilakuan peran ilmu psikologi, sosiologi dan sosial psikologi sangatlah kuat.

Teori Keperilakuan

Teori dasar dalam perilaku, yang terdiri dari bidang sosiologi, sosial-psikologi dan psikologi, sangat mempengaruhi juga dalam perkembangan penelitian dalam membangun akuntansi keperilakuan (Lubis 2010). Perilaku terkait dengan manusia, sehingga ilmu yang terkait dengan manusia ini dibagi dalam mempelajari manusia itu sendiri (psikologi), hubungan manusia dengan manusia lainnya (sosial-psikologi) dan hubungan manusia dengan masalah kemasyarakatan (sosiologi).

Penelitian akuntansi keperilakuan didominasi pada dua landasan konseptual yaitu teori keperilakuan khususnya perilaku organisasi serta teori agensi (*agency theory*) yang mendasarkan pada ilmu ekonomi (Shields dan Young 1993).

Akuntansi Keperilakuan di Sektor Publik

Akuntansi sektor publik dulu dikenal sebagai akuntansi pemerintahan berkembang pesat pada tahun 2000 sejalan dengan bergeraknya roda reformasi sektor publik di Indonesia. Tuntutan rakyat akan terlaksananya *good government governance* dan penegakan demokrasi turut memaksa birokrasi untuk mere-inventing kembali organisasinya agar menjadi organisasi yang efisien, efektif dalam menciptakan terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, penelitian akuntansi keperilakuan pada organisasi publik masih sangat jarang dilakukan namun beberapa mulai bermunculan. Kebanyakan penelitian masih terinspirasi oleh penelitian serupa di organisasi bisnis, misalnya penelitian tentang sistem pengendalian akuntansi yang dihubungkan dengan kinerja dan fenomena *budgetary slack*.

Organisasi sektor publik terdiri dari instansi pemerintahan dan organisasi nirlaba. Pada organisasi pemerintahan aspek akuntansi keperilakuan terjadi pada setiap siklus

anggaran. Siklus anggaran pemerintahan terdiri dari tahap perencanaan, tahap ratifikasi, tahap implementasi dan tahap pelaporan/pertanggungjawaban (Mardiasno 2000).

Keperilakuan di Siklus Perencanaan Anggaran

Fase ini merupakan tahap awal bagian dari persiapan anggaran dari keseluruhan siklus anggaran. Perencanaan merupakan tugas utama dari eksekutif sebagai bagian dari tanggungjawab utamanya dalam mengelola negara. Di Indonesia, perencanaan negara diatur dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengatur tahapan perencanaan. Dalam perencanaan dikenal perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Perencanaan jangka panjang berjangka waktu 20 tahun dan perencanaan jangka menengah berjangka waktu lima tahun. Pada institusi pemerintahan, badan perencana baik pusat maupun daerah memiliki fungsi strategis karena bertanggungjawab penuh sebagai pemilik tugas pokok dan fungsi. Adapun perencanaan tahunan yang sifatnya jangka pendek memiliki arti lebih strategi lagi karena pada perencanaan tahunan inilah tindakan riil akan direalisasikan atau dieksekusi.

Saat ini terjadi reformasi penganggaran yang mengakibatkan perubahan perilaku di sektor publik. Pada paradigma lama pengelolaan keuangan negara didasarkan *fundamental distrust*, kontrol terhadap input relatif sangat ketat. Hal ini tercermin dari anggaran berdasarkan *line item*, kontrol terhadap komitmen, verifikasi yang ketat terhadap dokumen pembayaran, dan kontrol akuntansi.

Banyak faktor yang mempengaruhi *budgetary slack* masuk salah satunya adalah faktor budaya. Budaya paternalistik kuat berpengaruh dalam meningkatkan *budgetary slack*. Berbagai permasalahan di lapangan membuktikan hal itu. Contoh timbulnya polemik atas surat edaran KPK untuk tidak menggonggarkan THR dari APBD maupun APBD (Times Indonesia 2015). Dapat dipahami upaya KPK untuk memberantas korupsi melalui himbuan ini. Namun kali ini

tampaknya KPK akan berhadapan dengan budaya yang sudah sangat mengakar. Dalam masyarakat Indonesia momentum hari raya tidak saja sekedar semangat merayakan dengan berbagai hidangan istimewa tetapi ada semangat berbagi di dalamnya. THR yang diperoleh juga digunakan untuk men-THR-i lagi, THR bagi pembantu rumah tangga, loper koran atau juga berbagi angpau saat mudik ke desa. Bahkan bagi seorang pegawai rendah sekalipun turut menyisihkan sejumlah seribu atau lima ribuan bagi sanak saudara. Lebih baik tidak mudik kalau tidak memiliki sesuatu untuk "ninggali".

Di sisi lain himbuan KPK agar pemberian THR tidak menggunakan dana APBD sebetulnya sama artinya bahwa PNS tidak diperbolehkan menerima THR. Dan kalau ini terjadi maka terdapat perlakuan diskriminasi terhadap tenaga kerja karena pemberian THR juga berlaku di sektor swasta sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Walaupun dalam suratnya dinyatakan bahwa hadiah lebaran dapat diberikan dengan dana yang berasal dari iuran pejabatnya. Hal ini sangat sulit untuk direalisasikan karena gaji maupun tunjangan pejabat PNS masih rendah. Apakah tidak sebaliknya, himbuan ini justru akan mendorong pejabat untuk menerima pemberian dari pihak lain?

Menyikapi perkembangan yang terjadi di Indonesia saat ini terutama pengungkapan kasus korupsi, terdapat indikasi yang kuat bahwa korupsi telah mulai ada bahkan juga pada proses penyusunan anggaran. Wakil Ketua DPD RI, La Ode Ode menyatakan bahwa terdapat tiga pihak yang terlibat, seperti pernyataannya sebagai berikut: "Saat ini, menurutnya praktik mafia anggaran antara eksekutif dan oknum-oknum anggota DPR RI yang di-'backing' para pengusaha (dengan imbalan 'fee') sudah sangat merajalela".

Ia berpendapat bahwa praktik mafia anggaran di DPR RI harus segera dihentikan agar tidak semakin merusak tatanan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta proses demokratisasi yang sehat, bermartabat dan beradab.

Isu perilaku dalam aspek ratifikasi anggaran sangat kental dengan nuansa politik. Tindak ulur kepentingan eksekutif dan legislatif sering terjadi, tahapan yang slot sehingga menyebabkan mundurnya jadwal pengesahan APBD. Banyak APBD pemerintah daerah di Indonesia yang mengalami keterlambatan pengesahan. Bahkan menurut Menteri Dalam Negeri, pada tahun 2008, dari 33 propinsi hanya 22 propinsi yang menyelesaikan APBD tepat pada waktunya. Tentu saja keterlambatan pengesahan ini menyebabkan terganggunya proses penganggaran berikutnya yang lebih krusial, yaitu realisasi mewujudkan berbagai program pembangunan untuk kepentingan rakyat.

Kutipan Waspada online, 14 Januari 2006 memperkuat dugaan terjadinya aspek politik terjadi pada tahap ratifikasi: "Ada beberapa sebab yang membuat RAPBD 2006 menjadi problem politik. Pertama ialah rentetan kepergian Gubsu Tengku Rizal Nurdin karena tragedi Mandala di Padang Bulan. Pengajuan RAPBD 2006 akan mengangkot botong terendam (jajahgate) Wagubsu yang sudah hampir tiga tahun berjalan.

Kutipan di atas mengindikasikan keberadaan akuntansi keperlakuan yang menginspirasi beberapa penelitian untuk mengeksplorasinya antara lain yang dilakukan oleh Abdulah dan Asmara (2006) dalam penelitiannya tentang perilaku oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah. Temuan penting dalam penelitiannya menunjukkan bahwa (1) legislatif berperilaku oportunistik dalam penyusunan APBD, (2) besaran PAD berpengaruh terhadap perilaku oportunistik legislatif, dan (3) APBD merupakan media bagi terjadinya *political corruption*.

Perilaku Disfungsional

Perilaku disfungsional didefinisikan sebagai perilaku menyimpang. Dalam konteks psikologi perilaku disfungsional disebut sebagai abnormalitas. Abnormalitas (atau perilaku disfungsional) adalah sesuatu yang menyimpang dari normal atau berbeda dari yang khas, adalah perilaku karakteristik yang ditentukan secara subyektif, diberikan untuk mereka yang

memiliki kondisi langka atau disfungsional (Whithbourne dan Halgin 2014). Beberapa kriteria konvensional abnormalitas: Distress, seseorang yang menampilkan banyak depresi, kecemasan, ketidakbahagisan akan dianggap sebagai menunjukkan perilaku abnormal karena perilaku mereka muncul karena kesesahan mereka sendiri. Moralitas, melanggar etika dan melanggar standar masyarakat.

Dalam penelitian akuntansi perilaku disfungsional banyak diteliti pada auditor khususnya akuntan publik (Fatimah 2012; Sudjana dan Sawarjowono 2006; Wilopo 2006). Eksternal auditor adalah salah satu aktor yang terlibat pada tahap keempat siklus penganggaran pemerintah yaitu siklus pemeriksaan keuangan. Banyak aktor terlibat dalam proses penganggaran pemerintah, yaitu eksekutif dalam hal ini pejabat pemerintah, legislatif yaitu anggota parlemen dan pemeriksa. Fokus penelitian ini adalah untuk menemukan perilaku disfungsional pada tahap perencanaan anggaran. Tidak banyak peneliti yang mengeksplor hal ini. Arah riset terkait perilaku disfungsional pada tahap perencanaan lebih mengarah pada fenomena *budgetary slack* dan *opportunistic behaviour*.

METODA PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan aspek keperlakuan sektor publik khususnya di siklus penganggaran pemerintah sehingga digunakan metode kualitatif meta analysis. Penelitian berbasis teks ini menggunakan analisis konten dengan bantuan software kualitatif Nvivo dan Mind Mapping-Mindjet untuk lebih memudahkan pemetaan komprehensif dengan mudah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan secara eksploratif memetakan berbagai aspek psikologi, sosiologi, perilaku disfungsional dan aspek politik dalam siklus penganggaran pemerintah.

Sampel penelitian adalah seluruh artikel penelitian yang terbit tahun 1998–2015 di Prosiding Simposium Nasional Akuntansi yang bertopik Akuntansi Sektor Publik. Proses pemilihan sampel disajikan pada tabel 2.

DAFTAR REFERENSI

- 1 Abdullah, S. (2012). Perilaku Oportunistik Legislatif Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya: Bukti Empiris dari Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. Universitas Gadjah Mada.
- 2 Abdullah, S., dan J. A. Asmara. 2006. *Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah: bukti empiris atau aplikasi agency theory di sektor publik*. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.
- 3 Anri, A.B., D. Priatnojo. 2012. *Pengusaha er-usur garap proyek pemerintah*. <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/336748-pengusaha-waswas-garap-proyek-pemerintah> (diakses 14 Maret 2014).
- 4 Apella, F. 2013. Pencitraan partai demokrat di harian Kompas dan jawa pos dalam pemberitaan pemeriksaan Asas Urbaningrum oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK). *Jurnal e-komunikasi* 1 (3): 198-209.
- 5 Argyris, C. 1974. *Behind the front page: Organizational self-renewal in a metropolitan newspaper*. San Francisco Jossey-Bass.
- 6 Amiali, I., dan E. Kartikaningdyah. 2010. Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, politik penganggaran, perencanaan dan informasi pendukung terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen kua-ppas di lingkungan pemerintah kota Tanjungpinang. *Simpotium Nasional Akuntansi* 13.
- 7 Balmeier P., dan J. Kelly. 1996. The Ethic of sentencing white-collar criminals. *Journal of Business Ethics* 15 (2): 143-152.
- 8 Bossessur, A. M. 2010. An institutional review of planning budgeting and monitoring in the Caribbean: Challenges of transformation. *International Journal of Public Sector Management* 23 (1): 22-37.
- 9 Dwiputrianti, S. 2012. *Forging Indonesian public administration through reforming policy in performance auditing for good governance*. Paper presented at the Asia- America-Africa- Australia Public Finance Management Conference "Public Reform For Good Government Governance", Post Graduate Building, UPN "Veteran " Jawa Timur, Surabaya, Indonesia.
- 10 Fakhry, S., dan D. Said. 2014. Budget process pemerintahan daerah: Menelusik nilai kemandirian atas perilaku aktor anggaran. *Jurnal Analisa* 3 (2): 189-194.
- 11 Fatimah, A. 2012. Karakteristik personal auditor sebagai antecedent perilaku disfungsional auditor dan pengaruhnya terhadap kualitas hasil audit. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi* 1 (1): 1-12.
- 12 Garudfalvi, L. 1997. Corruption in the public expenditures management process. Paper presented at 8th International Anti Corruption Conference, Lima, Peru, 7-11 September. http://www.transparency.org/iacc/8th_iacc/papers/garudfalvi/garudfalvi.html
- 13 Goddard, A. 2004. Budgetary practices and accountability habitus: A grounded theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 17 (4): 543-573.
- 14 Helmuth, U. 2011. *The impact of performance budgeting on public management*. Doctor Oeconomiae, University of St. Gallen.
- 15 Hendrianto, R., dan B. Setiyono. 2014. Analisis akuntabilitas politik reses. Studi tentang kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Politic and Government Studies* 3 (3): 266-275.
- 16 Jusaidi, L. T. 2014. Perilaku legislatif dalam praktik penganggaran dengan pendekatan nilai-nilai kearifan lokal (nilai budaya sasak). *Simpotium Nasional Akuntansi* 17 Manado.
- 17 Kenarwas, Y. C. 2013. *Reconnecting the missing link: SBP and the democratic*

- party. Nanyang Technological University, Singapore.
- 11 Koonce, L., dan M. Mercer. 2005. Using psychology theories in archival financial accounting research. *McVane Research Paper Series No ACC-01-05*.
- 48 Lubis, A. I. 2010. *Akuntansi keperilakuan*. Jakarta: Salemba Empat.
- 38 Madmosh, N. B., dan P. Quattrone. 2010. *Management accounting and control systems: An organizational and sociological approach*. New York: John Wiley & Sons.
- Manginto, S. Y., E. G. Sukoharsono, dan E. Sanawati. 2015. Pengetahuan anggaran serta peran partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan budaya politik terhadap pengawasan keuangan anggota DPRD (studi kasus di jayapura). *Simpodium Nasional Akuntansi 18 Medan*.
- Mardiasno. 2000. *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- McCaferly, E. J., dan J. Stenrod. 2006. *Behavioral public finance*. Russell Sage Foundation.
- 13 McGill, R. 2001. Performance budgeting. *International Journal of Public Sector Management* 14 (5): 376-390.
- Moore, W. B., P. J. Pomanski, R. Kehey. 2000. A path analytic model of municipal budgetary slack behavior. *Proceedings of The American Business and Behavioral Sciences* 7 (1): 29-43.
- Pariyry, G. I. O., dan P. H. Adi. 2015. *Political interest legislatif dalam pengalokasian anggaran daerah pada sektor pekerjaan umum (studi pada pemerintah provinsi Maluku)* Paper presented at the International Public Sector Conference, Surabaya.
- Praspari, N., dan M. K. Dewi. 24 5. Pengaruh penalaran moral aparat pengawas internal pemerintah (apip) dan tekanan situasional terhadap kecenderungan melakukan fraud saat mengaudit: Sebuah studi eksperimen. *Simpodium Nasional Akuntansi 18 Medan*.
- Rashid, F., dan A. Goddard. 2015. The development of balanced scorecards in the public sector of Brunei Darussalam: A Grounded theory. *Paper presented at the Comparative International Government Accounting Research, University of Malta, Valeta*.
- Riharjo, I. B., M. Sudarna, G. Irianto, dan Rosidi. 2015. Penganggaran daerah: Konsensus, kekursan dan politik anggaran. *Simpodium Nasional Akuntansi 18 Medan*.
- Rosadi, D. 2013. Representasi karier politik Anas Urbaningrum di Partai Demokrat pada sampul detik online dan gatra online. Universitas Paljadjaran.
- Shields, M. D., dan S. M. Young. 1993. Antecedents and consequences of participative budgeting: Evidence on the effects of asymmetrical information. *Journal of Management Accounting Research* 5: 265 – 280.
- Siegel, G., dan H. R. Marconi. 1989. *Behaviour accounting*. Chicago: South-Western Publishing Co.
- Sungul, H., dan A. Maulana. 2013. Dynamics of the corruption eradication in Indonesia. *March Personal RePEc Archive*.
- 34 Sopanah. 2012. Ceremonial budgeting dalam perencanaan penganggaran daerah: Sebuah keindahan yang meripu. *Simpodium Nasional Akuntansi 15 Banjarmasin*.
- 11 Sopanah, dan Mankasno. 2003. Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. *Simpodium Nasional Akuntansi VI Semarang*.
- Sopanah, A. 2015. Dibalik ceremonial budgeting: "Rembug Desa Tengger" partisipasi nyata dalam pembangunan. *Simpodium Nasional Akuntansi 18 Medan*.

- Seiwigati, dan A. R. Fitrianto. 2012. *Could new order administration policies in women development and empowerment programs be used as role model for recent programs in Indonesia? (A good practices of women empowerment in Indonesia new order era)*. Paper presented at the Asia- America-Africa- Australia Public Finance Management Conference "Public Reform For Good Government Governance", Post Graduate Building, UPN "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia.
- Soelang, A. N. R., dan W. Utomo. 2012. *Inkonsistensi perencanaan dan anggaran (Studi kasus perencanaan dan anggaran di Kabupaten Minahasa Tenggara)*. Universitas Gadjah Mada.
- Sudjana, E., dan T. Sawarjowono. 2006. *Perilaku disfungsional auditor: Perilaku yang tidak mungkin dihentikan*. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 8 (3): 247-259.
- Sugale, A. F., dan S. Wibawa. 2013. *Opportunisme penyuap kebijakan anggaran dalam penyusunan APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2013: Fenomena dalam pelaksanaan belanja biasa*. Universitas Gadjah Mada.
- Times Indonesia. 2015. *KPK: PNS dilarang minta-jatah THR*. <http://www.timesindonesia.co.id/laca/101993/20150707/163559/kpk-pro-dilarang-minta-jatah-thr/> (diakses 14 Juli 2015).
- Whitbourne, S. K., dan R. P. Holgin. 2014. *Abnormal psychology: Clinical perspectives psychological disorders*. 7th Edition. New York: McGraw Hill.
- Wilopo. 2006. *Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor: Studi pada kantor akuntan publik di Jawa Timur*. *Akuntansi dan Teknologi Informasi* 5 (2).
- Wildavsky, A. B. dan N. Caiden 2004. *The new politics of the budgetary process*. New York: Pearson.
- Winarna, J., dan S. Murni. 2007. *Pengaruh personal background, political background dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (Studi kasus di Kabupaten Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006)*. *Simpesum Nasional Akuntansi X Makasar*.
- Yuhertiani, I. 2005. *Kapasitas individu dalam dimensi budaya, keberadaan tekanan sosial dan keterkaitannya dengan budgetary slack (Kajian perilaku eksekutif dalam proses perencanaan anggaran di Jawa Timur)*. *Paper presented at the Simposium Nasional Akuntansi, Denpasar*.

02. PERILAKU DISFUNGSIONAL PADA SIKLUS PENGANGGARAN PEMERINTAH: TAHAP PERENCANAAN ANGGARAN

ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	110.5.99.78 Internet	159 words — 3%
2	ejournal.narotama.ac.id Internet	116 words — 2%
3	www.neliti.com Internet	103 words — 2%
4	www.pps.unud.ac.id Internet	94 words — 2%
5	docobook.com Internet	89 words — 1%
6	eprints.undip.ac.id Internet	88 words — 1%
7	jurnal.unsyiah.ac.id Internet	80 words — 1%
8	repository.stiesia.ac.id Internet	77 words — 1%
9	stiepena.ac.id Internet	65 words — 1%
10	eprints.soton.ac.uk Internet	62 words — 1%

11	id.123dok.com Internet	52 words — 1%
12	letaba346.blogspot.com Internet	47 words — 1%
13	ejournal.stiesia.ac.id Internet	44 words — 1%
14	nswahdi.com Internet	43 words — 1%
15	ejournal.uksw.edu Internet	39 words — 1%
16	repository.usu.ac.id Internet	38 words — 1%
17	repository.ugm.ac.id Internet	33 words — 1%
18	www.bppk.depkeu.go.id Internet	33 words — 1%
19	repository.unib.ac.id Internet	29 words — < 1%
20	suherman28.blogspot.com Internet	28 words — < 1%
21	www.feeddiary.com Internet	26 words — < 1%
22	mafiadoc.com Internet	25 words — < 1%
23	repository.unika.ac.id Internet	24 words — < 1%
24	jurnal.bpk.go.id Internet	24 words — < 1%

25	muharieffendi.net Internet	23 words — < 1%
26	journal.ummy.ac.id Internet	21 words — < 1%
27	studentjournal.petra.ac.id Internet	21 words — < 1%
28	ejournal3.undip.ac.id Internet	19 words — < 1%
29	www.unkhair.ac.id Internet	19 words — < 1%
30	iribu.ac.ir Internet	18 words — < 1%
31	repository.unpad.ac.id Internet	17 words — < 1%
32	journal.trunojoyo.ac.id Internet	17 words — < 1%
33	parliamentarystrengthening.org Internet	16 words — < 1%
34	ejournal.lipi.go.id Internet	16 words — < 1%
35	www.doria.fi Internet	16 words — < 1%
36	philpapers.org Internet	16 words — < 1%
37	suwito1.wordpress.com Internet	16 words — < 1%
38	www.mybooklibrary.com Internet	15 words — < 1%

39	mpra.ub.uni-muenchen.de Internet	11 words — < 1%
40	118.97.33.150 Internet	11 words — < 1%
41	kusnandarunpam.blogspot.com Internet	11 words — < 1%
42	repository.uui.ac.id Internet	11 words — < 1%
43	akuntans1.widyatama.ac.id Internet	11 words — < 1%
44	pusatpanduan.info Internet	11 words — < 1%
45	repository.uinjkt.ac.id Internet	10 words — < 1%
46	www.slideshare.net Internet	10 words — < 1%
47	jurnal.umrah.ac.id Internet	10 words — < 1%
48	jab.fe.uns.ac.id Internet	9 words — < 1%
49	maskura.blogspot.co.id Internet	9 words — < 1%
50	José Luis Zafra-Gómez, Antonio M. López-Hernández, Ana María Plata Díaz, Gemma Pérez López. "The duration of financial stress", Academia Revista Latinoamericana de Administración, 2014 Crossref	8 words — < 1%
51	en.wikipedia.org Internet	8 words — < 1%

52	www1.unisg.ch Internet	8 words — < 1%
53	wartaekonomi.co.id Internet	8 words — < 1%
54	anzdoc.com Internet	8 words — < 1%
55	Sandra Alves. "Contabilidade, Controlo de Gestão e Gestão nos Hospitais Portugueses: Dicotomia Público versus Privado", Repositório Aberto da Universidade do Porto, 2013. Publications	6 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY OFF

EXCLUDE MATCHES OFF